

## **BAB 3**

### **Basis Sosial PKS di Kabupaten Kebumen**

Dalam bab ketiga ini, menggambarkan basis sosial PKS dari aspek kesejarahan Kabupaten Kebumen, kondisi demografi, dinamika politik lokal Kebumen, eksistensi, struktur, dan kaderisasi serta kiprah PKS dalam Pemilu di Kebumen.

#### **3.1. Historisitas Kabupaten Kebumen**

Sejarah bermulanya Kabupaten Kebumen tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Mataram Islam. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterkaitan peristiwa yang dialami. Kerajaan Mataram membawa pengaruh bagi terbentuknya Kabupaten Kebumen yang masih di dalam lingkup kerajaan Mataram. Lokasi Kabupaten Kebumen termasuk struktur Kerajaan Mataram di wilayah Manca Negara Kulon (daerah Kademangan Karanglo).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor: 1 Tahun 1990 mengenai penetapan hari jadi Kabupaten Kebumen dan dari berbagai sumber lainnya diketahui bahwa latar belakang lahirnya Kabupaten Kebumen ada beberapa versi. Namun begitu, dalam hal ini akan diungkapkan versi yang lebih mendekati secara asal usul nama Kebumen.

Menurut versi ini, asal muasal nama Kebumen adalah adanya tokoh Kyai Pangeran Bumidirja. Beliau adalah bangsawan ulama dari Mataram, adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Beliau dikenal sebagai penasihat raja yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Kyai Pangeran Bumidirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Beliau berpegang pada prinsip agar raja adil dan bijaksana, di samping itu juga beliau sangat kasih dan sayang kepada rakyat kecil.

Pada suatu saat Kyai Pangeran Bumidirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I, karena Sunan Amangkurat I ini sudah melanggar paugeran

keadilan, bertindak keras, dan kejam. Bahkan berkompromi dengan VOC (Belanda) dan memusuhi bangsawan, ulama dan rakyatnya. Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan direncanakan akan dibunuh, karena menghalangi hukum qishos terhadap Kyai Pangeran Pekik dan keluarganya (mertuanya sendiri). Kyai Pangeran Bumidirjo lebih baik pergi meloloskan diri dari kungkungan sunan Amangkurat I, dan dalam perjalanannya beliau tidak memakai nama bangsawan, namun memakai nama Kyai Bumi saja. Tahun 1670, Kyai Pangeran Bumidirjo sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara kelok sungai Lukulo. Pada tahun itu juga dibangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama daerah Ki Bumi atau Ki-Bumi-An, hingga sekarang menjadi Kebumen.

Kelahiran Kabupaten Kebumen diambil dari segi nama, maka versi Kyai Bumidirjo yang dapat dipakai dan mengingat latar belakang peristiwanya tanggal 26 Juni 1677. Berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Pangeran Kyai Bumidirjo, mendapat awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat. Hal itu berarti Kebumen adalah tempat tinggal Pangeran Bumidirjo. Sejarah Indonesia pada saat dipegang Pemerintah Hindia Belanda telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara, keadaan demikian memuncak sampai klimaksnya sekitar tahun 1930. Salah satu perwujudan pengetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah Kabupaten (regentschaap).

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Kebumen telah mengalami penggabungan menjadi satu daerah Kabupaten menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran negara Hindia Belanda tahun 1935 nomor 629. Berdasarkan ketetapan Surat Keputusan tersebut maka Surat Keputusan terdahulu tanggal 21 juli 1929 nomor 253 artikel

nomor 121 yang berisi penetapan daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi. Ketetapan baru tersebut telah mendapat persetujuan Majelis Hindia Belanda dan Perwakilan Rakyat (Volksraad). Sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan tersebut maka luas wilayah Kabupaten Kebumen yang baru yaitu: Kutowinangun, Ambal, Karanganyar dan Kebumen.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah. Sampai sekarang Kabupaten Kebumen telah memiliki Tumenggung/Adipati/Bupati sudah sampai 29 kali. Kabupaten Kebumen berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan terletak pada bagaian selatan. Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Purworejo di sebelah timur. Letak Kabupaten Kebumen pada peta adalah antara 7<sup>o</sup> sampai 8<sup>o</sup> lintang selatan dan 109<sup>o</sup>- 110<sup>o</sup> bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,5 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. (Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2008).

Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan, 1.930 Rukun Warga (RW) dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Sementara itu, penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 berdasarkan proyeksi penduduk mencapai 1.241.437 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2008 adalah 969 jiwa tiap km<sup>2</sup>. (Daerah Kabupaten Kebumen di bagian utara berupa perbukitan terutama di Kecamatan Sadang, Karangsembung, Sempor dan Alian, sedangkan di bagian selatan pada umumnya berupa dataran rendah, kecuali di beberapa tempat di Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah. (Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun, 2008).

Lihat **Gambar 3.1.**  
**Peta Geografis Kabupaten Kebumen:**



Sumber <http://petakebumen.blogspot.com>

Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan. Daerah ini memiliki batas sebelah barat oleh Kabupaten Cilacap dan Banyumas sebelah utara Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, sebelah selatan oleh Samudra Indonesia.

**Gambar:3.2.**  
**Peta Jalan Kabupaten Kebumen**



Sumber <http://petakebumen.blogspot.com/>:

Sejarah awal penyebaran Islam di Kebumen antara lain bisa dilacak dari keberadaan *muassis* (pendiri) pondok pesantren Al Kahfi, Sumolangu yaitu Syekh Abdul Kahfi al-Awal yang lahir di Tarim, Hadhramaut, Yaman pada tahun 830 H (1426 M). Tatkala berusia 17 tahun ia diangkat Sultan Yaman Bahlul Amar bin Malik an Nasir untuk menjabat sebagai panglima perang selama tiga tahun. Setelah itu selama tiga tahun ia pergi ke Mekkah dan belajar pada al Imam al Mujtahid Muhammad bin Idris as Syafi'i ra. Setelah usai menuntut ilmu di Mekkah ia menuju tanah Jawa untuk menyebarkan Islam.

Pada tahun 854 H (1450 M) Syekh Abdul Kahfi dengan perahu jukung mendarat di pantai Karangbolong (sekitar 15 km arah barat daya kota Kebumen sekarang). Saat itu tanah Jawa dikuasai Majapahit yang diperintah oleh Raja Kertawijaya (ayah Raden Patah) yang berkuasa antara 1400 – 1447 M. Setelah beberapa lama melakukan Islamisasi dan menetap di Kebumen ia melanjutkan perjalanan ke Ampel dan membantu Sunan Ampel selama tiga tahun. Setelah itu ia berpindah ke Demak dan akhirnya menetap di Kudus selama 15 tahun. Tatkala di Kudus Syekh Abdul Kahfi menikah dengan Dewi Rosowulan (putri Raden Patah). Setelah beberapa lama mengembara akhirnya Syekh Abdul Kahfi kembali ke Kebumen dan mendirikan masjid Alang-Alang Wangi pada tahun 885 H (1480 M).

Versi lain sebagaimana diungkap dalam kajian Singgih Tri Sulistyono menyatakan bahwa Syekh Abdul Kahfi adalah seorang ulama besar yang menduduki jabatan tinggi pada ketentaraan Yaman yang datang ke kerajaan Mataram atas permintaan Sultan Agung kepada Mufti Syafii di Mekkah. Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1970:20) bahwa Syekh Abdul Kahfi Awwal datang tahun 1000 H (1580H). Namun pendapat itu diragukan Sulistyono, karena Mataram baru berdiri tahun 1586 M. Maka kedatangan Syekh Abdul Kahfi Awwal ditafsirkan pada masa pemerintah Sultan Agung antara 1613-1645 M.

Setelah tiba di Mataram ia menikah dengan salah seorang putri Sultan Agung. Saat itu Sultan Agung berkata kepadanya sambil menunjuk suatu tempat “Sama-langu”. Sebuah kalimat Arab yang kacau yang berarti “di situ tempatmu”. Seharusnya Sultan Agung mengatakan “*tsamadha ’u*”. Di tempat yang kemudian menjadi desa/ tanah perdikan Sumolangu itulah Syekh Abdul Kahfi al-Awal beserta anak cucunya bertempat tinggal. Setelah wafat ia dimakamkan di sebuah bukit kecil yaitu Lemah Lanang. Kiai Haji Mahfudz Abdurrachman (Kiai

Sumolangu) adalah tokoh sentral dalam peristiwa Angkatan Umat Islam (AUI) Kebumen 1945 –1950. (Sulistiyono,2000).

Kelompok etnis terbesar di Kebumen adalah penduduk pribumi suku Jawa. Mereka adalah petani, buruh tani, buruh perusahaan, sebagian pedagang, pegawai negeri, pengambil sarang burung walet, dan lain lain. Pada tahun 1951, Kebumen berpenduduk 764.227 jiwa dengan komposisi 760. 556 pribumi Jawa, 3.544 Tionghoa, 99 Arab, 15 Belanda, dan bangsa-bangsa lain 13 jiwa. Di awal kemerdekaan Indonesia, kebudayaan yang menonjol di Kebumen adalah kebudayaan santri. Ketika itu, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh penduduk desa di Kebumen merupakan penganut Islam. Pada tahun 1951, lebih dari 96 % penduduknya beragama Islam.(Arsip Pemkab. Kebumen,1953:6)

Meskipun daerah Kebumen pada zaman dahulu (pra kemerdekaan) merupakan bagian dari wilayah mancanegara kerajaan Mataram, namun kebudayaan Jawanya menunjukkan sifat-sifat yang agak berbeda dari sebelah timurnya. Hal itu antara lain terlihat dari logat bahasa ibunya. Di Kebumen. bahasa ibu yang digunakan tampaknya merupakan campuran antara logat Banyumas dan logat Jawa, dengan kecenderungan logat Banyumas yang lebih dominan. Demikian juga adat istiadat dan kesenian yang hidup di masyarakat menunjukkan campuran yang serupa. Bahkan, Koentjoroningrat memasukkan Kebumen dan sekitarnya dalam kawasan budaya tersendiri, yaitu Kawasan Budaya Bagelan.

Menurut paradigma Clifford Geertz dalam masyarakat Jawa terdapat tiga varian “agama Jawa”, yaitu priyayi, santri dan abangan. Dilihat dari tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan praktik keagamaannya (Islam), sebenarnya hanya ada dua kelompok masyarakat Jawa, yaitu santri dan abangan. Di sisi lain, priyayi lebih menunjuk pada status sosial seseorang sebagai bagian dari elite tradisional. (Geertz, 1983).

Santri adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam yang tinggi. Di awal Kemerdekaan, kelompok santri ini sebagian besar berafiliasi ke organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki jaringan merata di semua kecamatan yang ada di Kebumen. Di samping itu sebagian kecil lainnya berafiliasi ke Muhammadiyah yang pada umumnya terkonsentrasi di kota-kota kecamatan yang terletak di tepi jalan negara yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan Purwokerto ataupun Jakarta. Misalnya di kota kecamatan Kebumen, Pejagoan, Sruweng dan Gombang.

Abangan adalah istilah untuk menyebut segolongan orang Islam yang menerima Islam hanya sebagai keyakinan namun jarang melaksanakan ibadah menurut agama Islam dan lebih berpegang pada tradisi yang sudah ada. Abangan sebagai gejala kultural merupakan pewarisan terhadap nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Istilah-istilah itu menunjukkan dimensi-dimensi variasi kebudayaan. Priyayi, sebagai suatu komunitas sosial, termasuk dalam klasifikasi Abangan. (Koentjoroningrat, 1979)

Di antara 22 kecamatan yang saat itu ada di Kabupaten Kebumen, ada lima kecamatan yang mayoritas penduduknya termasuk golongan abangan, yaitu kecamatan Karanganyar, Sempor, Buayan, Gombang dan Karanggayam. Selain itu, kelompok abangan juga nampak tercermin dalam kelompok “Kalang” yang berdomisili di kawasan kecamatan Ambal dan dan kawasan Kebumen tenggara hingga kawasan pantai Petanahan. Kelompok “Kalang”, konon berasal dari Kotagede maupun Pleret, Yogyakarta; yang karena faktor politik terusir ke Kebumen bagian tenggara. Bahkan selama beratus-ratus tahun mereka mempertahankan diri dengan cara menikah hanya sesama kelompok Kalang. Pada umumnya mereka bergerak di



bidang perdagangan dan secara kultural lebih mencerminkan ciri-ciri Abangan

Tradisi Jawa semacam gamelan, selamatan, wayang, adalah pengungkapan kultural golongan abangan. Meskipun mayoritas penduduk Kebumen beragama Islam dan cenderung menunjukkan derajat intensitas penghayatan agama yang kuat (santri), namun demikian dalam hal kebudayaan Jawa yang mistis tampaknya golongan santripun tidaklah terlampau menentang keras sepanjang tidak mengarah kepada kemusyrikan.

Golongan etnis yang paling banyak setelah suku Jawa adalah warga suku keturunan Tionghoa yang mencapai sekitar 3.544 jiwa pada tahun 1951. Mereka terpusat di kota Kebumen dan Gombang. Hampir semuanya bekerja di sektor swasta, yaitu sebagai pemilik perusahaan, pedagang sampai ke lintah darat. Melalui sektor ini mereka relatif dapat menguasai perekonomian kota. Dalam banyak hal mereka berbeda dengan masyarakat pribumi, baik dalam hal ekonomi, politik, budaya maupun agama. Kebanyakan dari mereka penganut Nasrani atau kepercayaan para leluhurnya. Mereka di awal kemerdekaan sangat dibenci oleh Kiai Pondok Pesantren. Bahkan Haji Nursodik (Adik Kiai Sumolangu) pernah mensponsori aksi huru-hara anti Cina di Kebumen. (Sulistiyono,2000:68)

Secara sosiologis keterlibatan masyarakat (umat Islam) Kabupaten Kebumen dalam institusi keagamaan (*religious civic association*) hampir merata di setiap desa atau kelurahan. Ada kisaran 627 pondok pesantren, 109 masjid; 287 surau/mushola yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa. Dalam konteks ini dapat dilihat adanya banyak acara keagamaan misalnya: Mauludan, Rajaban, dan Ruwahan atau Sya'banan.

Mobilitas sosial umat Islam (sebagai basis sosial PKS) dan tingkat urbanisasi cukup tinggi. Hal ini sedikit banyak akan berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat Kebumen pada saat pemilihan umum. Keterkaitan antara partisipasi politik,

budaya politik dan strategi pengembangan PKS di Kabupaten Kebumen menjadi hal yang menarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat muslim Kebumen terhadap eksistensi PKS.

### **3.2. Demografi dan Dinamika Politik Lokal Kebumen**

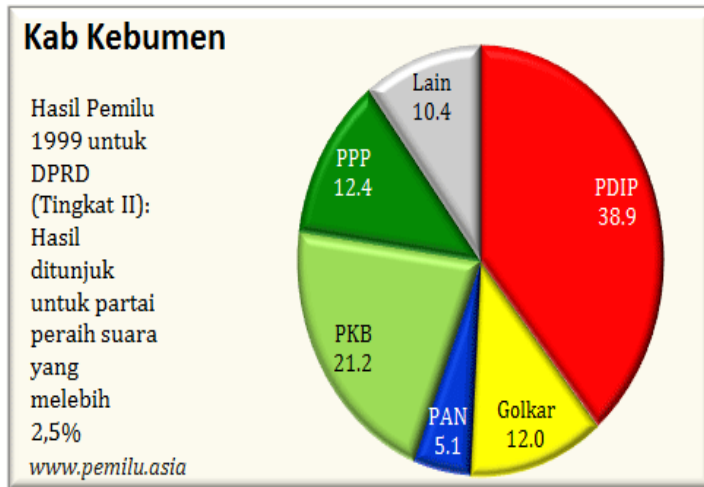
Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 581.947 jiwa dan perempuan sebanyak 581.644 jiwa. Jika dilihat dari persebaran penduduk, maka penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 10,24%, dan penduduk paling sedikit di Kecamatan Padureso sebesar 1,13% dari penduduk Kabupaten Kebumen (1.163.591 jiwa). Menurut kategori umur, penduduk di bawah 15 tahun sebesar 27,50% (319.987 jiwa) dan penduduk 65 tahun ke atas sebesar 8,73% (101.581 jiwa), sedangkan penduduk yang berumur kisaran 15 tahun sampai dengan 65 tahun yaitu 63,77% atau 742.022 jiwa.

Awal era reformasi menjadi salah satu momentum kebangkitan partai berhaluan Islam, meskipun direpresentasikan oleh partai berbasis massa Islam dan partai berasas Islam, mulai dari PPP, PBB, PKB, PAN, PK, PNU, PKNU, PSII, Masyumi dan lain sebagainya. Pada pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama era reformasi, di Kabupaten Kebumen, PDI-P yang dianggap mewakili kalangan abangan mendapatkan dukungan 38,3% (16 kursi) disusul dua partai yang banyak didukung kalangan Islam “tradisional” yaitu PKB 21,2% (9 kursi) dan PPP 12,2% (7 kursi) Golkar yang sering dianggap mewakili kelompok priyayi meraih 12,1% (5 kursi), PAN yang dianggap representasi kalangan Islam “modernis” meraih dukungan 5,2% (1 kursi), sedangkan Partai Keadilan belum bisa menduduki kursi DPRD Kebumen. (lihat Gambar.3.3)

Pemilihan bupati Kebumen periode tahun 2000-2005 dimenangkan oleh pasangan Dra. Hj. Rustriningsih dan KH Nashirudin al Manshur yang diusung oleh PDIP. Secara politik dominasi kelompok “abangan” dan “nahdhiyin” sangat kuat baik

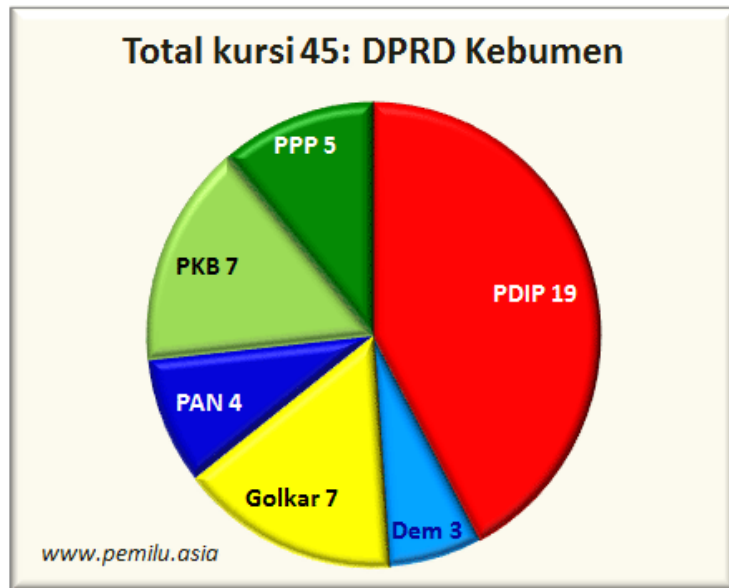
itu di parlemen maupun di eksekutif. Realitas sosial politik Kebumen direpresentasikan oleh figure kepemimpinan daerah dari kader PDIP dan PKB.

**Gambar:3.3**  
**Dominasi Perolehan Kursi Legislatif Th.1999**



Pada pemilu legislatif 2004 dominasi PDIP semakin kuat karena perolehan kursi DPRD II Kebumen meningkat menjadi 19 kursi, kendatipun ada penurunan pada PKB yaitu dari 9 kursi menjadi 7 kursi. (lihat Gambar; 3.4). Kendatipun begitu pada pemilihan Bupati periode 2005-2010 secara langsung pasangan Dra Hj. Rustriningsih dengan KH Nashirudin yang diusung PDIP dan PKB kembali memperoleh kepercayaan masyarakat Kebumen dengan memenangi kompetisi pemilihan kepala daerah yang kedua kalinya. Tetapi pada periode kedua tidak terselesaikan karena Rustriningsih terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, mendampingi Bibit Waluyo, untuk periode tahun 2008-2013.

**Gambar:3.4**  
**Dominasi Perolehan Kursi Legislatif Th.2004**



Dinamika politik lokal Kebumen pada tahun 2009 terlihat dari hasil pemilu legislatif yaitu menurunnya perolehan suara PDIP menjadi 15 kursi kendatipun masih sebagai pemenang pemilu. Adapun PKB memperoleh kursi 5, PAN meraih 3 kursi, sedangkan PKS baru bisa menduduki 1 kursi. Pada pemilihan bupati 2010-2015 koalisi “partai islam” berhasil memenangi kontestasi demokrasi secara dramatis (dua putaran) dengan mengusung pasangan Buyar Winarso dan Djuwarni yang mengalahkan pasangan KH Nashiruddin dan Probo Indartono yang diusung oleh koalisi “Nahdhiyin dan Abangan”

Kemudian pada tahun 2014 fenomena politik Kebumen berubah secara cukup signifikan karena kendatipun dominasi kaum abangan masih terlihat kuat, akan tetapi mulai menurun drastis yaitu karena perolehan kursi PDIP menjadi 9 kursi.

Sedangkan perolehan kursi PKS menjadi 3 kursi yang uniknya ketiga kursi itu diduduki oleh kader-kader perempuan. Dan, ketika pemilihan Bupati periode 2015-2020 pasangan calon bupati yang diusung PDIP dapat dikalahkan oleh koalisi PAN, PKB, PPP dan Gerindra.

Peningkatan perolehan suara dan kursi PKS pada pemilu 2014 walaupun “sedikit”, akan tetapi secara politik lokal Kebumen menandakan bahwa PKS semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kebumen.

### **3.3. Eksistensi PKS di Kebumen**

PKS lahir di Kebumen sebagai salah satu partai yang berazaskan Islam sejak tahun 1998 yaitu dengan nama PK namun secara sah berubah nama menjadi PKS sejak tahun 2003, karena adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya agar bisa ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2002, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkumham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

PKS hadir di Kebumen dengan kerka keras, cerdas, dan ikhlas sehingga bisa meyakinkan untuk meyakinkan masyarakat Kebumen yang notabene secara sosiologis sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Sesuai pernyataan salah satu pendiri PKS Kebumen; Haryoko, S.Pd. bahwa: “Lengsernya pak Harto merupakan kesempatan partai berasaskan Islam untuk menunjukkan partisipasi politiknya, karena sebelumnya seakan dibungkam, sehingga PKS di Kebumen ingin meyakinkan masyarakat melalui kegiatan dakwah; majelis taklim dan kepedulian PKS terhadap masalah agama”(Wawancara

dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Eksistensi PKS di Kebumen sebenarnya sudah ada sejak akhir Desember 1998 setelah kelahiran DPP Partai Keadilan, kendatipun ketika itu masih sangat sederhana. Adapun Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Kabupaten Kebumen Periode 1998-2003 berdasarkan Surat Keputusan dari DPW PK Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Zuber Syafawi terdiri dari Ketua: Haryoko, S.Pd., Sekretaris: Drs. Rahadi, Bendahara: Mundzir Hasan, S.Pd. Namun enam bulan kemudian Haryoko mengundurkan diri dari Ketua karena menjadi pegawai negeri sipil (guru). Kemudian diganti oleh Abdul Kholiq, S.Kom.

Kantor DPD PK Kebumen bertempat di Jalan A. Yani – Jatisari-Kebumen. PK sebagai partai dakwah menjalankan aktivitas politiknya dengan semangat dakwah islamiyah secara massif dalam rangka menuju pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999. Betapapun cara meraih suara telah dilakukan dengan efektif tapi jumlah perolehan suaranya 4244 suara dan belum bisa meraih kursi DPRD Kebumen. (Wawancara dengan Drs. Rahadi, Sekretaris DPD PK Kebumen pada hari Sabtu, 21 Desember 2013).

Dewan Pimpinan Daerah PKS Kebumen terlibat secara aktif di perkumpulan masyarakat khususnya yang bersifat keagamaan (majelis taklim). Hal inilah yang menjadikan PKS mulai dikenal dan kemudian dapat diterima masyarakat. Sebagaimana pendapat Fatah Banani Ketua DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa PKS hadir di Kebumen dengan menyesuaikan kondisi masyarakat, khususnya dalam hal keagamaan para Kader PKS ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, baik di mushola atau masjid-masjid, karena hal ini menjadi satu kesempatan bagi kami (PKS) untuk mendekati masyarakat, disamping kegiatan di Masjid sudah biasa kami lakukan dalam halaqah-halaqah sebelum PKS lahir dulu.” (Wawancara dengan

Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

Di samping hal tersebut di atas, para kader PKS juga memberikan kontribusi infrastruktur kepada lembaga-lembaga keagamaan khususnya tempat-tempat ibadah. Sumbangan infrastruktur didapatkan melalui program-program yang diusung oleh para wakil rakyat yang berada di legislatif dengan melalui pengajuan proposal bantuan ke lembaga-lembaga keagamaan. Hal tersebut dibenarkan oleh Fatah Banani sebagai berikut:

“Dengan hadir di tengah kegiatan masyarakat, sehingga kami tahu problem dan harapan masyarakat, terutama yang paling menonjol masalah pembangunan tempat ibadah, ya di situlah kami dapat berperan, lewat kader PKS yang menjadi wakil rakyat dan kami ajukan proposal-proposal.” (Wawancara dengan Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

PKS merupakan partai yang didukung oleh kader-kader militan. Ini terbukti dengan keberadaan kader-kader tersebut bersama masyarakat berusaha mewujudkan infrastruktur yang baik, khususnya di bidang keagamaan. Hal ini merupakan sebuah strategi politik yang dijalankan oleh PKS agar dapat diterima oleh masyarakat Kebumen. Haryoko mengutarakan sebagai berikut:

“Kader kami memang dilatih untuk menjadi kader-kader yang handal, oleh karena itu kader kami juga harus siap terjun langsung ke masyarakat dalam membantu masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa kami benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya berkaitan dengan agama Islam” (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

“Dari sistem pengkaderan kami tidak sembarangan, jadi kami punya dua cara yaitu rekrutmen *fardi* dan *jama'i*. Kalau rekrutmen *fardi* itu dari kegiatan tarbiyah kami dan *jama'i*

sebagaimana pengkaderan partai lain”, ungkap Haryoko. (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Eksistensi PKS Kebumen juga tidak bisa lepas dari perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Bentuk kepedulian itu diwujudkan dengan pembangunan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Husnul Hidayah. DPD PKS Kebumen dari Dapil (Daerah Pemilihan) 2 ikut berperan serta dalam acara peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada Sabtu, 29 November 2008. Hadir juga dalam acara tersebut caleg PKS untuk DPRD Propinsi Jawa Tengah, Listyo Nugroho, SE. Siti Ulfah, serta caleg dari Dapil 2 Kebumen seperti Mulyani, Tyasning, Aji Budiharjo, dan ketua DPD PKS Fatah Banan bersama Ketua Pertimbangan DPD PKS, Ustadz. Rahadi,. Selain itu hadir pula Camat Alian, Amirudin, SIP., kyai-kyai setempat, seperti Kyai Mustangin, Kyai Jalaludin, Kyai Mustolih, dan masyarakat sekitar hingga mencapai 150 peserta yang hadir. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Camat Alian, dan Kyai Mustangin.

Pendidikan merupakan hal yang sangat ditekankan PKS baik pada program dan kegiatannya maupun bagi para kadernya. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang perjuangan PKS sehingga unggul baik di dalam bidang pendidikan umum maupun pendidikan agama, sebagaimana Haryoko mengutarakan;

“Bahwa pendidikan itu penting, maka dari itulah kenapa kami menekankan dasar pendidikan pada kader kami, tidak hanya masalah pendidikan umumnya, tetapi justru pendidikan agamalah yang lebih utama, dan harus matang, agar lebih siap terjun di masyarakat”. (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Berbagai program kegiatan dilakukan oleh para kader PKS, baik di dalam dunia pendidikan, sosial-keagamaan, maupun bantuan masyarakat secara luas untuk mewujudkan pembangunan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia.



Sebagaimana anggota DPRD II Kab. Kebumen dari PKS (2009-2014) menuturkan program andalan yang diperjuangkan PKS di parlemen;

“Kami mempunyai program PEDE atau Peduli Desa yang diperjuangkan kader PKS di parlemen, diantaranya; memperbesar ADD (Alokasi Dana Desa); santunan kematian untuk warga miskin dari APBD; pemberdayaan perempuan melalui UKM Pedesaan; Perbaikan sarana irigasi Desa; insentif tambahan untuk perangkat desa; bantuan modal usaha bagi perangkat desa; memakmurkan masjid, TPQ, dan kyai lokal; mendorong terwujudnya semangat Bali Deso”

(Wawancara dengan Drs. Rahadi, anggota DPRD II Kab. Kebumen dari PKS (2009-2014) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013).

PKS Kebumen juga mempunyai “Komitmen Kerakyatan” sebagai berikut ini:

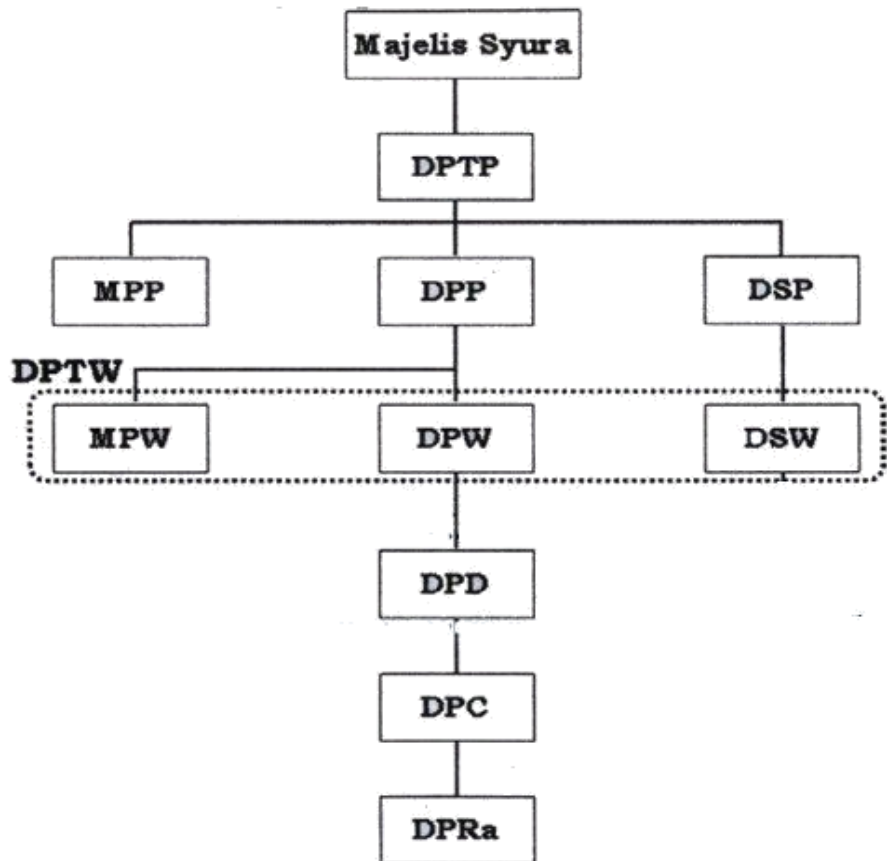
1. Menjadi suri tauladan dalam menjaga moral dan akhlak masyarakat dengan menghilangkan budaya dan praktek kolusi korupsi dan nepotisme, baik suap, pelican, pungutan liar, gratifikasi dalam setiap urusan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan.
2. Menjunjung tinggi dan berupaya mengangkat harkat, martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas pokok fungsi dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
5. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan seluruh komponen masyarakat.

6. Melakukan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.
7. Melaksanakan falsafah perjuangan, visi, misi, platform partai keadilan sejahtera demi terwujudnya cita cita pembangunan PKS menuju Indonesia madani.
8. Bersedia mundur atau melaksanakan pergantian antar waktu jika tidak bisa melaksanakan komitmen tersebut di atas.

### **3.4. Struktur dan Kiprah PKS Kebumen dalam Pemilu.**

Pada sub bab ini, sengaja skema struktur PKS di tingkat pusat dan kiprahnya dalam pemilu secara nasional digambarkan terlebih dahulu sebagai pengantar masuk pembahasan tentang PKS di Kebumen secara struktural dan fungsional. Struktur Organisasi PKS terdiri dari Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), Dewan Syariah Wilayah (DSW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pengurus Ranting (DPRa.) dapat dilihat dalam gambar 3.5. sebagai berikut:

**Gambar 3.5.**  
**Struktur Organisasi PKS**



Sumber:DPD PKS Kebumen

Berikut Rincian Tugas Jabatan dalam Organisasi PKS:

1. Majelis Syura

Dalam Ensiklopedi Islam kata *syura* dimaknai dengan permusyawaratan, hal bermusyawarah atau konsultasi. Majelis syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Istilah syura memiliki hubungan dengan kata

kerja *syawara-yusyawiru-musyawaratan* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat, musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain).(*Ensiklopedi Islam Vol.5*, Van Hoeve:18). Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga *Ahlul Halli wal-Aqdi* PKS.(*AD/ART Partai Keadilan Sejahtera*, Pasal 11). Tugas dari Majelis Syura adalah memilih dan membai'at pemimpin negara sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam lima poin di atas dengan demikian ia juga bertanggung jawab atas tugas tersebut untuk memilih dan membai'at orang-orang yang patut dan serasi untuk sesuatu jabatan. Apabila gagal memilih pemimpin yang adil maka mereka menjadi beban dan bertanggung jawab terhadap Allah sebagai Khaliq di hari kemudian. Untuk itu tugas dan tanggung jawabnya memang berat dan berisiko tinggi. Karenanya pula orang-orang 'arif dan bertanggung jawab sangat berhati-hati dengan persoalan tersebut.

## 2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP)

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai merupakan Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Partai berdasarkan AD/ART Partai dan Keputusan Kongres Partai. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai mempunyai wewenang bertindak keluar untuk dan atas nama Partai. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai menetapkan Pedoman dan Peraturan Partai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Partai, berdasarkan AD/ART Partai dan Keputusan

Kongres. Adapun tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai antara lain:

- a. Melaksanakan peraturan dan Keputusan Partai di tingkat Pusat serta menyelenggarakan manajemen Partai secara nasional
- b. Melaksanakan Program Partai di tingkat nasional
- c. Membenkan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Lembaga Partai, Petugas Partai dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan di lembaga lainnya di tingkat nasional
- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pendidikan kader Partai di tingkat nasional
- e. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif adalah lembaga

Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah lembaga tempat memberi tugas dan meminta pertanggungjawaban bagi Petugas Partai dalam lembaga perwakilan, lembaga eksekutif dan di lembaga lainnya di tingkat nasional. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai, bertanggung jawab kedalam dan keluar untuk dan atas nama Partai, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang oleh Kongres Partai diberi wewenang dan tanggung jawab khusus hanya kepada Ketua Umum Partai.

Yang dimaksudkan dengan wewenang khusus kepada Ketua Umum tersebut adalah wewenang untuk melakukan langkah organisatoris dan tindakan tertentu yang bersifat luar biasa, yang berkaitan dengan upaya menegakkan eksistensi, menyelamatkan perjuangan Partai, dan posisi partai dalam konstelasi nasional, terutama wewenang untuk merubah nama, lambang, lagu, dan bendera Partai.

### 3. Majelis Pertimbangan Pusat (MPP)

Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional. (*AD/ART Partai Keadilan Sejahtera*, Pasal 14).

### 4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima (5) tahun qomariyah. (*AD/ART Partai Keadilan Sejahtera*, Pasal 19).

### 5. Dewan Syariah Pusat (DSP)

Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan syar'i terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syar'i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat. (*AD/ART Partai Keadilan Sejahtera*, Pasal 17)

### 6. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW)

Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat wilayah yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima (5) tahun qomariyah. (*AD/ART Partai Keadilan Sejahtera*, Pasal 20)

### 7. Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)

Majelis Pertimbangan Wilayah adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan Musyawarah di tingkat Wilayah.

8. DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)

Menurut AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah peyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum. Berdasarkan ADART Partai Keadilan Sejahtera, tugas Dewan Pengurus Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu: tugas struktural, tugas konsepsional, dan tugas manajerial.

9. Dewan Syariah Wilayah (DSW)

Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan syar'i terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syar'i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat di tingkat wilayah.

10. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Menurut AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah peyelenggara eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota dan pengarah program struktur organisasi partai di tingkat ranting yang berkedudukan di ibu kota kabupaten

11. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah peyelenggara eksekutif Partai tingkat kecamatan dan pengarah program struktur organisasi partai di tingkat ranting yang berkedudukan di ibu kota kecamatan

12. Dewan Pengurus Ranting (DPRa)

Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat desa.

Berikut ini susunan personalia

**DPP PKS Masa Khidmat 2015-2020:**

1. Ketua Majelis Syuro : Dr. Salim Segaf Al-Jufri
2. Wakil Ketua Majelis Syuro : Dr. Hidayat Nur Wahid
3. Sekretaris Majelis Syuro : Ir. H. Untung Wahono, M.Si
4. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suharna Surapranata, MT
5. Ketua Dewan Syariah Pusat: Dr. KH. Surahman Hidayat
6. Presiden : Sohibul Iman, Ph.D
7. Sekretaris Jenderal : Dipl.Ing Taufik Ridlo, Lc
8. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mardani Ali Sera
9. Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
10. Wakil Bendahara Umum : Dr. Abdul Kharis Al Masyhari
11. Ketua Bidang Kerjasama Internasional : Anis Matta, Lc
12. Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : H. Abdul Muiz Saadih, MA
13. Ketua Badan Pembinaan Hubungan Luar Negeri: Dr.Taufik Ramlan Wijaya
14. Ketua Badan Perencanaan : KH. Buchori Yusuf, Lc MA
15. Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Dr.H.A. Heryawan, Lc.M.Si
16. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Utara : Dr. Hermanto
17. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Selatan:Drs.H.Gufron Azis Fuadi
18. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar : Tate Qomarudin, Lc
19. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya : Ir. H. Sigit Sosiantomo
20. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali : Sugeng Susilo
21. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan : H. Aboe Bakar, SE



22. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi : Cahyadi Takariawan
23. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Intim:Dr.H.Muhammad Kasuba, MA
24. Ketua Bidang Kaderisasi : Amang Syafruddin, Lc
25. Ketua Bidang Kepemudaan : Mustafa Kamal, S.S
26. Ketua Bidang Kepanduaan dan Olahraga : Asep Saefullah Danu
27. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dra. Wirianingsih,M.Si
28. Ketua Bidang Seni dan Budaya : Muhammad Ridwan
29. Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi : Drs. H. Musholli
30. Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi & Usaha Kader: Deni Tresnahadi
31. Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Hilman Rosyad, Lc
32. Ketua Bidang Polhukham : Drs. H. Almuzammil Yusuf, M.Si
33. Ketua Bidang Kesra : Dr. Fahmy Alaydroes, MM, MED
34. Ketua Bidang Keuangan, IPTek., dan LH: Ir. H.Memed Sosiawan, ME
35. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan : Ledia Hanifah Amalia
36. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Drs. Khoirul Anwar
37. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Dedi Supriyadi, S.I.Kom.

Adapun struktur organisasi PKS Kabupaten Kebumen:

**Tabel 3.1.**

**Struktur Organisasi DPD PKS Kabupaten Kebumen  
Periode 2006-2010**

<b>MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH</b>	
Ketua	Drs. Rahadi
Sekretaris	Any Kurnianingsih, A.Md.
Anggota	Siti Ulfah, A.Md
<b>DEWAN SYARIAH DAERAH</b>	
Ketua	Darin
<b>DEWAN PENGURUS DAERAH</b>	
1. Ketua	Fatah Banani
2. Sekretaris	Achmad Kurniawan, STP
3. Bendahara	Anas Syafiuddin
4. Ketua Bidang Pembinaan Kader	Pramono, SPd
5. Bagian Kaderisasi dan Diklat	
6. Bagian Dakwah, Maahid & Dirosah Islamiyah	Sri Chambaryati, A.Md
7. Ketua Bidang Polhum & HAM	Kastolani
8. Ketua Bidang Kesra	
9. Bagian Pendidikan SDM, Seni dan Budaya	Nur Hidayati, SH
10. Bagian Kesehatan, dan Sosial	Windu Widiarto, SPd
11. Bagian Pelajar dan Mahasiswa	EndangWahyuningsih,A Md
12. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Ranto, A.Md
13. Ketua Bidang Kewanitaan	
14. Ketua Bidang Ekuintek	
15. Bagian Ekonomi, Keuangan	Hendra Trihapsara, S.Kel

<p>&amp; UKM</p> <p>16. Bagian Buruh, Tani &amp; Nelayan</p> <p>17. BAPPILU</p> <p>18. BAHUMAS</p>	<p>Mohammad Arifin Mulyani</p> <p>Yulie Herlin, A.Md</p> <p>Ahmadi, S.Pt</p> <p>Nur Chamid Rusimin, SE Imdad Durokhman Eni Suryaningsih, S.Si</p>
--	---

Sumber : DPD PKS Kebumen

Kiprah PKS mulai semenjak pemilu pertama pasca reformasi pada Tahun 1999. Ketika itu PK (Partai Keadilan) memperoleh suara 1,4 juta pemilih. Perolehan kursi di DPR RI: 7 kursi, DPRD Provinsi dan Kabupaten sebanyak 105 kursi, serta satu orang menteri pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. (Waluyo,2005:45). Pada 21 Mei 2000, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden PKS - dalam Munas I PK di hotel Bumiwiwara-Depok, menggantikan Nurmahmudi Ismail yang menjadi Menteri Kehutanan. Namun langkah PK menyemai benih dakwah di lahan politik terbentur ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum tentang *electoral threshold* yang mengakibatkan PK tidak bisa ikut dalam Pemilu 2004.

Oleh karena itu, PK merubah namanya menjadi PKS sehingga bisa ikut kontestasi pada pemilihan umum 2004. Dan, PKS meraih 7,34% suara (8.325.020) kemudian pada pemilu 2009 perolehan suara PKS meningkat yakni menjadi sebesar 7,9% dan tergolong lebih eksis di tengah terpuruknya parpol berbasis umat Islam. Pada kampanye pemilu 2009, PKS

tidak banyak menampilkan sikap politiknya dalam isu isu penegakan syariat dan memposisikan dirinya terlibat lebih jauh dalam perdebatan yang lebih ideologis. PKS lebih memilih pendekatan pragmatis dengan harapan bisa memperluas dukungan dari basis konstituen. Kampanye media yang paling fenomenal adalah pengakuan terhadap mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Bersamaan dengan itu, latar belakang warna bendera PKS bukan lagi putih melainkan lebih berwarna-warni. Dari sini terlihat, secara organisasional, PKS adalah partai kader yang bergerak menjadi *catch all*.

**Tabel 3.2.**

**Perolehan Suara PKS Secara Nasional (Pemilu 1999-2014)**

<b>Tahun</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>%</b>	<b>Kursi di DPR</b>	<b>%</b>
1999	1,436,565	1.36	7	1.51
2004	8,325,020	7.34	45	8.18
2009	8,204,946	7.88	57	10.18
2014	8.480.204	6.79	40	6.79

Sumber; Diolah dari berbagai sumber

Kader yang militan, infrastruktur yang mendukung dan program-program keagamaan, pendidikan, juga bakti sosial dari PKS berhasil membawa PKS mendapatkan perhatian masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hal ini dibuktikan pada pemilu legislatif 2004 mendapatkan suara sebanyak 20.965 dari 620.765 DPT yang melakukan pencoblosan yang sah. Jumlah suara tersebut menempati urutan ke-7 (tujuh) terbanyak dari partai lain, sebagaimana PDIP menempati urutan pertama dengan suara 234.922, kemudian PKB sebanyak 102.206, disusul PPP sebanyak 53.080, kemudian PAN sejumlah 42.963, dan Partai Demokrat sebanyak 35.598.

Kendatipun belum bisa meraih kursi DPRD, namun persebaran perolehan suara PKS di Kabupaten Kebumen tergolong banyak mengingat partai ini baru lahir dan mampu menduduki peringkat ke-7 (tujuh) perolehan suara dibandingkan dengan partai-partai lain yang telah berdiri lebih dahulu sebelum PKS. Selain itu perolehan suara tersebut cukup mengejutkan mengingat masyarakat Kebumen adalah basis warga Nahdliyin dan kaum Abangan, namun begitu PKS ternyata dapat meraih suara tersebut di atas kendatipun masih di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDIP.

**Tabel 3.3.**  
**Perolehan Suara PKS pada Pemilu 2004 di Kebumen**

NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU		PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN							JUMLAH AKHIR
		KBM-1	KBM-2	KBM-3	KBM-4	KBM5	KBM-6	KBM-7	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	700	745	1.491	218	459	355	284	4.252
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	244	213	225	186	401	183	180	1.632
3	PARTAI BULAN BINTANG	776	1.136	798	1.005	1.952	1.347	779	7.793
4	PARTAI MERDEKA	363	199	370	1.288	301	399	90	3.010
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.141	8.501	9.117	8.993	7.346	3.765	6.217	53.080
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	0	85	0	0	0	0	654	739
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	0	331	0	0	641	340	0	1.312
9	PARTAI DEMOKRAT	5.076	5.289	3.804	3.883	4.131	6.906	6.509	35.598
10	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	408	1.114	474	480	425	738	0	3.639
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	533	986	584	411	1.154	639	405	4.712
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	393	297	385	598	212	81	97	2.063
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.327	4.847	3.316	8.210	6.740	6.675	6.848	42.963
14	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	958	442	957	791	1.554	1.120	911	6.733
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	22.939	18.518	12.208	21.233	16.329	5.696	5.283	102.206
16	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.124	2.690	2.364	2.449	3.748	3.669	1.921	20.965
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	600	357	580	378	513	854	0	3.282
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	24.554	26.727	35.414	23.110	38.268	50.333	36.516	234.922
19	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.946	11.851	13.687	9.908	13.357	17.177	11.924	89.850
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	50	0	274	47	102	278	109	860
22	PARTAI SARIKAT INDONESIA	232	161	0	0	0	0	0	393
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	0	0	0	0	140	0	75	215
24	PARTAI PELOPOR	100	0	0	100	302	44	0	546
	JUMLAH	89.464	84.489	86.048	83.288	98.075	100.599	78.802	620.765

Sumber: <http://kpu.kebumenkab.go.id>

Pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2009 PKS mendapatkan suara sebanyak 29.569 suara. Dan, berhasil memperoleh 2 kursi, yaitu; 1 kursi di Dapil Kebumen 2 ( Suratno), dan 1 kursi di Dapil Kebumen 6 (Drs.Rahadi).

**Tabel 3.4.**  
**Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota**  
**DPRD Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum**  
**Tahun 2009**

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK								
		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PARTAI AMANAT NASIONAL	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	P. DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PARTAI DEMOKRAT	P. KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
1	KEBUMEN 1				1	1	1	2	1	1
2	KEBUMEN 2		1		1	1	1	2	1	1
3	KEBUMEN 3			1		1	1	2	1	1
4	KEBUMEN 4			1	1	1	1	1	1	
5	KEBUMEN 5			1	1	1	1	3	1	
6	KEBUMEN 6	1	1	1		1		3	1	
7	KEBUMEN 7			1		1	1	2	1	
	JUMLAH	1	2	6	4	7	6	16	7	3

Sumber: <http://kpu.kebumenkab.go.id>

Kemudian pada Pilpres 2009 PKS Kebumen memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Budiono yang memperoleh 143.536 suara sehingga perolehan suara paslon presiden SBY dan wapres Budiono paling banyak ketimbang perolehan paslon lainnya

**Tabel 3.5.**  
**Perolehan Suara Pilpres 2009 di KPUD Kebumen**

A	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Jumlah Pindahan	KEC. AYAH	KEC. BUAYAN	KEC. PURING	KEC. PETANAHAN	KEC. KLIRONG	KEC. BULUSPESANTREN	KEC. AMBAL	KEC. MINT	KEC. PREMOH	KEC. KUTOWIHANGUH	Jumlah Dipindahkan
	Hj. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN H. PRABOWO SUBIANTO		14.457	16.251	12.739	9.346	10.389	8.829	10.879	8.870	4.279	6.691	102.730
02	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PROF. DR. BOEDIONO		14.824	10.675	13.501	17.060	17.793	15.858	16.684	13.268	9.235	14.638	143.536
03	H. M. JUSUF KHALA DAN H. WIRANTO		2.328	1.476	1.901	2.989	2.467	2.885	2.030	2.193	1.235	1.969	21.473
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		31.609	28.402	28.141	29.395	30.649	27.572	29.593	24.331	14.749	23.298	267.739
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1.853	2.327	2.679	2.453	2.095	2.583	2.800	1.942	931	1.561	21.224

Sumber: <http://kpu.kebumenkab.go.id>

Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010, putaran kedua PKS bergabung dengan Koalisi Kebumen Bersatu (KKB) yaitu PAN, PKNU, PPP, dan Gerindra mendukung pasangan H. Buyar Winarso, SE dan Djuwarni, A. Md., sehingga paslon bupati H. Buyar Winarso & Djuwarni, A.Md berhasil memenangkan kontestasi dengan mendulang suara sebanyak 272.779 atau 50,91 % dari total suara sah sebanyak 535.817 suara. Perolehan suara paslon nomor urut 3, Buyar-Djuwarni berselisih tipis 1,82% (9.741) dengan



perolehan pasangan nomor urut 2 KH Nashiruddin AM-Probo Indartono (Nashpro) yang mendapat 263.038 suara.

Pada Pemilu DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2014, PKS mendapatkan 50,355 suara dan memperoleh 3 kursi yang diduduki oleh tiga srikandi PKS. Lihat tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 3.6.**

**Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2014**

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH							JUMLAH		
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	SUARA SAH	PROSENTASE	KURSI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTAI NASDEM	6,546	4,580	5309	7071	8030	12217	6351	50,004	7.66%	5
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	19,255	13,154	7514	12346	13960	8487	2789	77,505	11.87%	6
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8,325	9,114	9196	5739	5925	5761	6295	50,355	7.71%	3
POI PERJUANGAN	9,993	13,971	14000	18455	16147	21781	26797	121,054	18.54%	9
PARTAI GOLONGAN KARYA	11,813	5,422	9982	7578	9829	7573	5455	57,652	8.83%	5
PARTAI GERINDRA	15,000	12,242	15275	9770	11627	16737	12476	93,127	14.26%	7
PARTAI DEMOKRAT	4,722	8,380	6387	7928	10959	6486	6180	51,042	7.82%	4
PARTAI AMANAT NASIONAL	7,320	6,927	12082	11216	15854	12374	7583	73,356	11.23%	7
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6,465	8,230	3805	6707	9014	3120	7010	44,351	6.79%	3
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,376	7,917	4547	1009	2721	3594	5359	29,523	4.52%	1
PARTAI BULAN BINTANG	315	400	473	301	310	831	322	2,952	0.45%	0
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	182	157	381	174	123	739	280	2,036	0.31%	0
JUMLAH	94,222	90,494	88,851	88,294	104,499	99,700	86,897	652957	100.00%	50

**3.5. Jalur Rekrutmen dan Kaderisasi PKS di Kebumen**

Jalur Rekrutmen dan Kaderisasi PKS di Kebumen tidak berbeda jauh dengan pengkaderan yang dilakukan oleh PKS di daerah lain yakni melakukan rekrutmen politik dengan dua cara, yakni rekrutmen *fardi* dan *jama'i*. Sistem rekrutmen dan

pengkaderan PKS dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu rekrutmen *fardi* dan *jama'i*. Rekrutmen *fardi* sendiri dilakukan oleh anggota Tarbiyah PKS terhadap beberapa orang. Dan, rekrutmen *jama'i* yakni rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan formal dan informal atau sering kita sebut perekrutan langsung ke partai seperti partai partai lainnya. ( Rahmat, 2008:278).

Sebagaimana penjelasan Haryoko;

“Jauh sebelum berdirinya PKS, aktifitas dakwah penggerak PKS membentuk sebuah jaringan dakwah. Salah satu kegiatannya adalah *liqo'*, yang membahas agenda-agenda dakwah dalam satu kelompok halaqoh itu, dan yang paling banyak tentang materi-materi keislaman yang disampaikan secara bertahap. Di dalam *liqo'*, mereka memiliki tingkatan-tingkatan, dan untuk masuk tiap tingkatan itu juga melalui suatu ujian atau pelatihan. Kata *liqo* itu sendiri berasal dari bahasa arab, artinya pertemuan. *Liqo* dalam hal ini berarti pengajian dengan anggota sedikit (sekitar 5 -10 org), membentuk lingkaran. Kalau anggota berlebih maka dibagi dua atau lebih.” (Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014)

Anggota atau kader baru yang direkrut dari Anak-anak Rohis (Rohani Islam) SMA atau dari kampus, ini dibina oleh seniornya/murrobbi dengan *liqo'* itu.

“*Liqo'* dilaksanakan berjenjang dan membentuk sel-sel, seperti jaringan telepon seluler atau bisnis MLM. Ada mad'u (murid/yunior) dan murabbi (guru/senior), setiap mad'u menjadi murabbi pada Liqa lain level bawahnya. Alumnus punya mad'u beberapa mahasiswa, mahasiswa tingkat 3 punya mad'u bbrp mhs tingkat 1, mahasiswa tingkat 1 punya mad'u beberapa siswa di tempat SMA dia. Dan setiap anggota “*Liqo*” tidak diperkenankan pindah “*Liqo*” tempat “*Liqo*” lain tanpa ijin. *Liqo* itu sendiri tidak bertujuan mencetak ahli syariah, tetapi

lebih kepada membentuk wawasan dan kepribadian yang Islami, dengan visi dan pemahaman atau madzab agama sesuai dengan PKS” ungkap Haryoko.( Wawancara dengan Pendiri PKS Kebumen: Haryoko, S.Pd. pada hari Ahad tanggal 05 Januari 2014).

Pengajian *Liqo* pada dasarnya sama dengan pengajian lainnya, letak perbedaanya adalah di *liqo* ada acara *sharing*, bicara keakraban. Juga muatan materi dan misi yang dibawa dari pengajian tersebut. Muatan *liqo* bisa dikatakan *syumul* (menyeluruh), bukan hanya kajian-kajian tentang syariah, akidah, akhlak, tapi juga muamalah, politik bahkan ekonomi jadi agenda juga. Materi dibuat terstruktur berjenjang.

Aktifitas murid dalam *liqo* baik ibadah maupun akhlak menjadi pantauan dari ustadz sehingga Murid tidak dilepas begitu saja, dalam sepekan sekali amalan-amalan yg dikerjakan murid jadi bahan renungan dan evaluasi bersama bagi para peserta *liqo* yg lainnya. Dengan demikian ikatan batin antar para peserta dalam satu *liqo* lebih dekat, demikian juga antara *murrobi* dan *mutarabi*. *Ukhuwah* sangat terasa. Inilah yang membedakan dengan pengajian. Pengajian biasa tidak ada acara *share* atau curhat.

### **3.6. Sumber-sumber Finansial**

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq bahwa partainya mempunyai banyak sumber keuangan: *Pertama*, kelompok pengajian yang dinamakan *Halaqah Tarawiyah*. Jumlahnya mencapai lebih dari 200 ribu kelompok pengajian. Pengajian *Halaqah Tarawiyah* menghimpun dana partai, setiap pekan masing-masing kelompok pengajian bisa menghimpun Rp 50-100 ribu. *Kedua*, PKS menerapkan infak wajib yang terdiri dari iuran wajib dan zakat penghasilan bulanan bagi anggota inti yang berjumlah lebih dari 600 ribu orang. Besaran infak wajib bulanan berbeda bagi setiap anggota karena disesuaikan

dengan besaran penghasilannya. *Ketiga*, PKS juga menerapkan zakat tahunan. Berupa zakat maal, zakat fitrah, infak dan shadaqah anggota. Biasanya dihimpun selama ramadhan. Lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola kader PKS juga menghimpun zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat. Dari pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif, diwajibkan memberikan infak bulanan. Anggota Fraksi PKS DPR tiap bulan membayar infak senilai Rp 20 juta ke DPP PKS.

Sumber lainnya yaitu penggalangan dana dengan istilah *ta'awun maali* atau partisipasi pendanaan. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan tertentu. Seperti musibah yang dialami anggota. *Ta'awun maali* bersifat sukarela termasuk jumlahnya. Bisa juga dilakukan dalam bentuk pinjaman lunak. Misalnya, kader meminjamkan dana Rp 500 juta untuk membantu membangun kantor DPD. Ada juga program kerjasama yaitu kader-kader PKS yang mengelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah dan bisnis menjalin kerjasama secara internal. Misalnya, BPR syariah milik kader bekerjasama program dengan Bidang Ekonomi di PKS. PKS juga memperoleh dana bantuan keuangan parpol dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Terakhir, PKS menerima hibah aset bergerak dari para dermawan (donatur).

Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan sumber pendanaan untuk biaya operasional di partainya. Ia sampaikan, sumber pendanaan PKS berasal dari infak para kader yang ditentukan oleh posisi serta penghasilan masing-masing. (Kompas.com 24 Mei 2013).

Mardani Ali Sera menegaskan, setiap kader yang menduduki jabatan potensial, seperti menteri atau anggota DPR, beban infak mencapai Rp 20 juta. Infaq tersebut dibayarkan setiap bulan melalui *auto debet*. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR juga memiliki kewajiban lebih

untuk memberikan infak sebesar Rp 2,5 juta ke DPW, dan Rp 1 juta ke DPD secara otomatis melalui rekening.

Sementara untuk kader lainnya, besaran infak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilannya. Ada lima kategori, yakni kader yang memberikan infak bulanan sebesar 2,5 persen, tiga persen, empat persen, lima persen, dan 7,5 persen dari jumlah penghasilannya. Para kader yang memberikan infak sebesar 2,5 persen adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, beban infak tiga persen untuk yang berpenghasilan Rp 3 juta sampai Rp 5 juta, dan beban infak empat persen yang penghasilannya mencapai Rp 10 juta. Adapun para kader yang memiliki penghasilan lebih Rp 10 juta per bulan memberikan infak sebesar lima persen. Sedangkan beban infak 7,5 persen ditujukan bagi kader PKS yang penghasilannya lebih dari Rp 30 juta.

Pemberian infak ini merupakan hal yang wajib di PKS. Apabila telat atau tak membayar, maka akan tercatat di bendahara, sanksi untuk kader yang melanggar hingga berupa pemecatan. "Kalau satu dua bulan telat masuk dalam sanksi ringan. Tapi kalau benar-benar dia menolak infak, maka itu akan berujung pemecatan," ujar Mardani.

Aliran dana dari DPP PKS yang diperuntukan kepada DPD menurut Fatah Banani selaku Ketua DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010 bahwa sumber keuangan PKS Kebumen tidak berbeda dengan sumber keuangan di DPD PKS lainnya. Namun begitu ada sumber finansial PKS lainnya, tidak hanya dari bantuan Pemerintah, ya seperti yang sudah dikatakan Pak Mahfudz Siddiq, dan Pak Mardani di media itu. Dana dari pemerintah, pengajian, kemudian infaq, zakat, ta'awun (partisipasi pendanaan kalau ada musibah atau pinjaman bagi kader), dan kami juga mendapatkan dari program kerjasama”

Apapun bentuk perolehan dananya, *insya Allah* kami dapatkan dengan halal, kendatipun ada pihak yang iri dengan sumber dana PKS sehingga akhirnya kasus impor sapi itu jadi sorotan. Pendek kata, kami berusaha kreatif melalui kerjasama program, baik pendidikan, ekonomi, dan sebagainya...demikian tegasnya. (Wawancara dengan Fatah Banani Ketua Umum DPD PKS Kebumen Periode 2006-2010, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015).

### **3.7. Tindakan Kolektif PKS Kebumen**

Aksi-aksi kolektif PKS Kebumen bagaimanapun juga tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa kolektif di tingkat pusat, maupun wilayah. Ini dikarenakan kader-kader PKS pada jajaran di bawahnya juga ikut berpartisipasi dalam beberapa event yang diadakan oleh DPP maupun DPW.

#### **3.7.1. Keterbukaan PKS**

Pada tanggal 1 Februari 2008 PKS menggelar musyawarah kerja nasional yang pertama di Hotel Inn Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali,. (*Detik.com*, 2 Februari 2008) Kalangan *elite* partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-nuslim berkompetisi dengan tiket *boarding pass* partai tersebut. (*Republika*, 20 Juni 2010). Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka. (Muhtadi,2012).

Akibat konflik tersebut, muncullah Forum Kader Peduli, yang berdiri pada September 2008 dan berpusat di masjid Al-Hikmah, Mampang, Prapatan, tempat PKS pertama kali dideklarasikan. Tokoh penting yang jadi pelopor di forum ini adalah Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan. Di samping itu, dan tokoh yang lebih berpengaruh

yakni Syamsul Balda, mantan wakil presiden Partai Keadilan. Forum ini ditujukan untuk "mengungkap noda hitam" para petinggi PKS ketika itu. (*Detik.com*, 24 Maret 2011)

### **3.7.2. PKS Watch**

Pada tahun 2010 muncul sebuah situs blog bernama *PKS Watch* yang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan dari PKS dan pada akhirnya menuai reaksi keras dari simpatisan PKS, yang kemudian mendorong terbentuknya blog tandingan yaitu blog *PKS Watch Watch*. Situs *PKS Wath* ternyata bukan situs resmi dari PKS. Dan, akhirnya situs ini hilang dari ruang publik sebab bertentangan dengan DPP PKS.

### **3.7.3. Warung Kaget.**

Salah satu aksi kolektif PKS di Kebumen adalah adanya pembukaan warung kaget pada bulan Ramadhan. Untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1434 H, Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kebumen mengadakan beberapa acara, di antaranya adalah Warung Kaget PKS Kebumen yang pada tahun 2013 ini lapaknya bertengger di alun-alun Kebumen tepatnya di sebelah timur jalan depan Masjid Agung Kebumen.

Menurut Ketua Bidang Humas DPD PKS Kebumen, Warung Kaget PKS ini dihimpun dari donasi para kader PKS Kebumen yang mampu. "Para kader membuat beberapa menu yang sudah ditentukan oleh panitia kemudian mengumpulkannya untuk dijual murah pada masyarakat Kebumen," terang Imdad. Lebih lanjut Imdad menyampaikan bahwa tindakan kolektif ini adalah sebagai lahan kepedulian para kader PKS. "Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian kader PKS Kebumen terhadap sesama sekaligus mengenalkan PKS sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum pada tahun 2014 nanti," imbuhnya.

Warung Kaget PKS ini merupakan warung dadakan yang diadakan rutin tahunan oleh DPD PKS Kebumen yang menjual beberapa sajian buka puasa di antaranya : koktail, kolak, burjo, gorengan, nasi bungkus. Koktail, burjo, dan kolak yang pada umumnya dijual dengan harga diatas Rp. 2000,- di Warung Kaget PKS Kebumen dijual hanya Rp. 1000,- , sedangkan nasi kardus yang harusnya berharga di atas Rp. 10.000,- di sini hanya dijual Rp. 5000,-, begitu juga dengan gorengan jika di warung lainnya dijual diatas Rp. 800,- di Warung Kaget PKS Kebumen ini hanya dijual Rp. 500,-. Harga-harga tersebut sangat terjangkau / murah meriah, karena dijual di bawah harga standar pasar maka warung tersebut mendapat julukan takjil bersubsidi. Warung Kaget yang hanya buka pada tanggal 15–28 Juli setiap pukul 16.00–17.00 ini selalu saja ramai pengunjung yang terdiri dari para petugas parkir, abang becak, karyawan kantor maupun masyarakat umum yang lewat. Ada juga mereka yang datang karena mereka sudah tahu bahwa PKS Kebumen setiap tahun selalu membuat Warung Kaget, sehingga mereka sangat menunggu dibukanya warung kaget ini.

PKS Kebumen membuka warung kaget dengan menggunakan mobil *pick up* ini menjajakan dagangannya secara dadakan di alun-alun Kebumen tepatnya di sebelah timur jalan depan Masjid Agung Kebumen. Warung ini dibuka sejak hari Senin (15/7/2013) dan akan berlangsung sampai dengan hari Ahad (28/7/2013). Aneka takjil yang tersedia dijual dengan harga murah, separuh dari harga pasar. Warung kaget ini disubsidi oleh kader-kader PKS Kebumen, "warung kaget PKS ini dihimpun dari para kader PKS Kebumen yang mampu," kata Ketua bidang Humas DPD PKS Kebumen, Imdad Durokhman.



### 3.7.4 Perempuan Berpolitik

Kiprah perempuan dalam dunia politik di Kebumen sangat menarik dalam perhatian penulis. Kabupaten Kebumen pernah dipimpin oleh Bupati perempuan pertama di era reformasi (Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si.) selama dua periode Tahun 2000-2005, dan terpilih kembali secara langsung untuk periode Tahun 2005-2010. Bahkan kemudian pada tahun 2008 terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Gubernur Bibit Waluyo. Dalam konteks sosial politik munculnya Rustriningsih, ketika itu dominasi budaya patriarki di Indonesia sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk kepemimpinan politik. Berdasarkan budaya ini, kaum laki-laki lebih dilegitimasi dalam politik dan hukum. ( Suara Merdeka, Rabu, 23-Mei-2012)

Hubungan perempuan dan politik tidak lepas dari *image* dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. *Image* yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah perempuan ‘tidak layak’ masuk dunia politik karena politik itu kejam, keras, dan penuh dengan intrik, yang hal itu hanya layak dan bisa dipenuhi oleh kaum laki-laki. Dalam konteks perpolitikan Indonesia saat ini, naiknya perempuan sebagai pemimpin politik (kepemimpinan lokal ataupun nasional) diwarnai pro-kontra karena adanya budaya patriarki, nilai-nilai sosial, dan justifikasi ajaran agama. Hal ini secara langsung atau tidak langsung, membatasi kiprah perempuan. Struktur dan sistem politik (sistem pemilu) sengaja atau tidak, diciptakan oleh laki-laki untuk laki-laki. Kecenderungan dalam budaya patriarki adalah bahwa tokoh politik perempuan (yang berkiprah di ranah publik) juga harus dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam

arti, peran politik diperbolehkan sejauh fungsi rumah tangga tetap bisa berjalan seperti biasa.

Fakta sosial politik di Kebumen dalam Pemilu Legislatif 2014 bahwa daftar pemilih tetap berjumlah 1.034.732 yang terdiri dari pemilih laki-laki 520.305 dan perempuan 514.427. Menurut Yulianto, M.Kom. anggota KPUD Kebumen, jumlah pemilih tersebut tersebar di 460 desa/kelurahan, dengan jumlah 3.014 TPS. Hasil Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Kebumen dikejutkan dengan fenomena keterpilihan tiga perempuan sekaligus dari PKS sebagai anggota DPRD Kebumen periode 2014-2019. Hal ini menjadikan prestasi tersendiri bagi PKS karena keterwakilan kader perempuannya tak tertandingi oleh parpol lainnya (PDIP: 2, Gerindra: 2, Nasdem: 2, Golkar:2, PD: 1, PAN:1).

Secara teoritik basis sosial (konstituen perempuan) PKS Kebumen memang cukup memadai. Hal ini direpresentasikan dengan pemenuhan kuota 30 % keterwakilan perempuan calon legislatif yaitu 14 caleg perempuan dari total 46 caleg yang didaftarkan pada KPUD Kebumen.

Adapun nama-nama anggota DPRD Kebumen dari PKS periode 2014-2019 yaitu:

1).Ermi Kristanti;1.774 suara dari daerah pemilihan 1 meliputi Kebumen dan Buluspesantren.



2). Herni Ning Susanti; 2.663 suara dari dapil 2 meliputi Kutowinangun, Alian, Sadang, Poncowarno, Karangsembung,



3). Nur Hidayati 2.897 suara dari dapil 3 meliputi Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, dan Padureso,

